



EFEKTIVITAS PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KOTA CIMAH

Atmi Amalia¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan PJU sebagai bagian dari pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan studi kasus di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas program dilakukan berdasarkan lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PJU di Kota Cimahi telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek pemahaman program dan ketepatan sasaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterlambatan penanganan kerusakan, ketidakmerataan penerangan jalan lingkungan, serta keterbatasan pemeliharaan. Meskipun demikian, program ini telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Kata kunci: Efektivitas Program, Penerangan Jalan Umum, Dinas Perhubungan, Pelayanan Publik, Kota Cimahi.

Abstract

Public Street Lighting (PSL) is a form of public service that plays an important role in supporting community safety, comfort, and security, particularly during nighttime activities. Local governments, through the Transportation Agency, are responsible for the provision and maintenance of PSL as part of basic public services. This study aims to analyze the effectiveness of the Public Street Lighting (PSL) Program implemented by the Transportation Agency of Cimahi City, with a case study in Cibabat Sub-district, North Cimahi District. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Program effectiveness is analyzed based on five dimensions: program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of objectives, and observable changes. The results indicate that the PSL Program in Cimahi City has been implemented quite effectively, particularly in terms of program understanding and target accuracy. However, the program has not yet been fully optimal due to constraints such as slow response to

damage reports, uneven distribution of lighting between main roads and residential streets, and inconsistent maintenance. Nevertheless, the program has produced positive impacts, including increased public safety and comfort during nighttime activities.

Keywords: Program Effectiveness, Public Street Lighting, Transportation Agency, Public Service, Cimahi City.

PENDAHULUAN

Salah satu infrastruktur dasar yang memiliki kontribusi besar terhadap kualitas hidup masyarakat adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU merupakan sarana yang keberadaannya menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam mendukung mobilitas pada malam hari. PJU berfungsi memberikan rasa aman bagi pengguna jalan, mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, meneka angka kriminalitas, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas pada malam hari. Lingkungan yang terang benderang memungkinkan warga untuk tetap beraktivitas di malam hari, baik dalam bidang perdagangan, jasa, maupun interaksi sosial. Keberadaan PJU menjadi salah satu indikator tata ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, pengelolaan PJU yang efektif merupakan salah satu bentuk konkret dari pelayanan publik, Rahmawati (2024).

Di tingkat nasional, keberadaan PJU bahkan diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penerangan jalan termasuk ke dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan menetapkan standar teknis terkait penyediaan, perawatan, dan pengelolaan PJU. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap penerangan jalan yang layak dan merata.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota penyangga Bandung Raya yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 600 ribu jiwa dengan kepadatan wilayah yang relatif tinggi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas aktivitas perkotaan, kebutuhan akan pelayanan public

yang berkualitas semakin mendesak, termasuk dalam hal penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan data (2024), Kota Cimahi pada tahun 2021 terdapat 16.497 titik lampu PJU yang terpasang di berbagai wilayah kota, kemudian pada tahun 2024 Kota Cimahi tercatat memiliki lebih dari 21 ribu titik penerangan jalan yang tersebar di berbagai Kawasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.654 titik merupakan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan besar, 4.571 titik berupa Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ), dan sekitar 13.320 titik merupakan Penerangan Jalan Gang (PJG). Data ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota telah berupaya memperluas cakupan penerangan, tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di lingkungan pemukiman dan jalan kecil yang sehari-hari digunakan masyarakat.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024, Dishub Cimahi telah melaksanakan berbagai program strategis yang menyentuh hampir seluruh aspek pelayanan transportasi, mulai dari penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, perpajakan, pengujian kendaraan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas dan penataan fasilitas pendukung transportasi. Seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab tantangan kota yang semakin padat, kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang aman, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2024, Dishub Cimahi telah melaksanakan berbagai program strategis yang menyentuh hampir seluruh aspek pelayanan transportasi, mulai dari penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, perpajakan, pengujian kendaraan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas dan penataan fasilitas pendukung transportasi. Seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab tantangan kota yang semakin padat, kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang aman, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meskipun jumlah titik PJU terus bertambah, permasalahan di lapangan masih cukup kompleks. Selama periode Januari Hingga Oktober 2024, tercatat ada 3.959 titik penerangan yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sekitar 402 titik merupakan lampu jalan

umum, 334 titik lampu jalan lingkungan, dan sisanya, yaitu lebih dari 3.200 titik merupakan lampu di jalan gang. Hal ini menunjukkan bahwa justru penerangan di jalan gang, yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat masih menjadi titik paling rentan mengalami kerusakan, Sundari (2024).

Kelurahan Cibabat merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Cimahi Utara yang cukup padat penduduk dan memiliki peran penting sebagai jalur penghubung, wilayah ini dilalui oleh beberapa ruas jalan strategis seperti Jalan Cihanjuang dan Jalan Jenderal Amir Machmud, yang setiap hari ramai dilintasi kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan intensitas mobilitas yang tinggi, keberadaan penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat. Namun, hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak permasalahan terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Cibabat. Salah satu kasus yang menonjol adalah kondisi lampu jalan yang mati di pertigaan Jalan Cihanjuang- Jalan Jenderal Amir Machmud. Lampu tersebut padam selama lebih dua minggu, bahkan berada di lokasi yang dekat dengan area perkantoran pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama pengemudi yang melintas pada malam hari, karena jalan menjadi gelap dan rawan kecelakaan. Beberapa warga juga mengeluhkan meningkatnya potensi kejahatan jalanan, seperti pencurian atau begal disekitar area gelap tersebut (2025).

Peran Dinas Perhubungan Kota Cimahi semakin jelas terlihat melalui alokasi anggaran yang cukup besar untuk program PJU dalam menanggapi kondisi yang ada. Berdasarkan (2024), pada tahun tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Dishub menanggarkan sekitar RP. 9 Miliar untuk membangun 615 titik penerangan baru. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai jenis penerangan, meliputi penerangan jalan gang (PJG), penerangan jalan lingkungan (PJJ), dan penerangan jalan umum (PJU) dekoratif. Sebaran pembangunan dilakukan di hampir seluruh kelurahan, diantaranya Pasirkaliki, Cibabat, Citeureup, Cipageran, Padasuka, Cimahi, Karang Mekar, Melong, Utama, Leuwigajah, hingga Cibeber. Selain itu,

beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Gedung Empat, Jalan Gandawijaya, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Gatot Subroto, Jalan Djulaeha Karmita, dan Jalan Pabrik Aci menjadi prioritas untuk pemasangan PJU dekoratif.

Dilansir dari (2025) Wali Kota Cimahi Ngatiyana, juga secara langsung mendorong program ini dengan meluncurkan tagline “Cimahi Baranang”. Beliau meresmikan pemasangan 21 titik PJU dekoratif di Jalan Gatot Subroto, yang kemudian dilanjutkan dengan 23 titik tambahan di Jalan Jenderal Amir Machmud, sehingga total terdapat 44 titik baru di dua ruas jalan utama tersebut. Proyek ini menelan biaya sekitar Rp. 3,6 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Desain lampu yang seragam dengan motif yang sama menjadi simbol penataan kota yang lebih *modern*, indah, dan selaras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas Program Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses pelaksanaan program, persepsi para pelaksana dan penerima manfaat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program PJU di tingkat lapangan.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan program PJU. Informan penelitian terdiri dari aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi, aparatur Kelurahan Cibabat, serta masyarakat sebagai pengguna dan penerima manfaat penerangan jalan umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, dengan waktu penelitian pada tahun 2024–2025, menyesuaikan dengan pelaksanaan dan evaluasi Program PJU yang sedang berjalan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, efektivitas program tidak hanya dipahami sebagai terlaksananya kegiatan pembangunan atau pemasangan PJU, tetapi juga sebagai kemampuan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas dipandang sebagai konsep yang menyeluruh, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak dari program PJU itu sendiri.

Analisis efektivitas Program PJU dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Adapun indikator yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas program penerangan jalan umum oleh dinas perhubungan di Kota Cimahi yaitu:

A. Pemahaman Program

Dimensi pemahaman program berkaitan dengan sejauh mana para pelaksana maupun penerima manfaat memahami secara komprehensif mengenai substansi, tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program yang dijalankan. Pemahaman ini sangat penting karena efektivitas program tidak akan tercapai apabila aktor yang terlibat tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Secara akademik, pemahaman program menjadi prasyarat dasar untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi, salah sasaran, maupun ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi.

Pemahaman pelaksana terhadap Program Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas program, karena

keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur memahami tujuan, mekanisme, dan dasar hukum program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi, khususnya Kepala Bidang Angkutan dan PJU serta Kasi PJU, diketahui bahwa aparatur pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif terhadap Program PJU. Hal ini tercermin dari penguasaan terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta pemahaman terhadap standar teknis dan prosedur pemeliharaan PJU. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh pengalaman kerja pelaksana yang cukup lama dalam menangani PJU di Kota Cimahi. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemeliharaan dan perbaikan PJU menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugas di lapangan. Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan program, yaitu meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan, pelaksana mampu menyesuaikan tindakan dengan kondisi lapangan tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Di tingkat kelurahan dan aparat wilayah, pemahaman terhadap Program PJU juga tergolong cukup baik meskipun tidak bersifat teknis. Kelurahan memahami perannya sebagai penghubung antara masyarakat dan Dinas Perhubungan, sementara ketua RT/RW memahami fungsi mereka dalam menyampaikan laporan warga terkait PJU. Adapun masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai keberadaan dan manfaat Program PJU, meskipun belum memahami prosedur teknis secara rinci. Secara keseluruhan, pemahaman pelaksana dan pihak terkait telah mendukung efektivitas pelaksanaan Program PJU di Kota Cimahi, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman di tingkat masyarakat.

Kejelasan informasi dalam pelaksanaan Program PJU menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program, karena informasi berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi, diketahui bahwa informasi teknis pelaksanaan Program PJU telah disampaikan secara jelas melalui Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang tercantum dalam tupoksi masing-masing jabatan. Kejelasan informasi tersebut membantu pelaksana lapangan memahami alur kerja, standar keselamatan, serta tahapan pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan PJU. Di tingkat pemerintah kelurahan dan aparat wilayah, informasi mengenai Program PJU juga disampaikan dengan cukup jelas melalui koordinasi langsung, surat resmi, dan rapat bersama. Informasi yang diterima mencakup tujuan program, rencana kegiatan, serta mekanisme pengajuan usulan dan pelaporan PJU yang rusak atau mati. Dengan adanya kejelasan informasi tersebut, kelurahan dan RT/RW dapat menjalankan perannya sebagai penghubung antara masyarakat dan Dinas Perhubungan secara efektif, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program di tingkat lingkungan. Namun demikian, di tingkat masyarakat, kejelasan informasi masih bersifat umum dan belum disampaikan secara formal dan tertulis. Masyarakat umumnya mengetahui Program PJU dari pengalaman langsung dan informasi lisan melalui RT atau RW, tetapi belum seluruhnya memahami mekanisme pelaporan secara langsung ke Dinas Perhubungan. Meskipun mekanisme informal ini masih berjalan cukup efektif, keterbatasan kejelasan informasi kepada masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi agar informasi Program PJU dapat diterima secara lebih merata dan jelas, sehingga mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

B. Ketepatan Sasaran

Efektivitas program juga diukur dari ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana program yang dijalankan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang telah ditetapkan dalam tujuan program. Ketepatan sasaran merupakan indikator yang menekankan pada relevansi antara program dengan kebutuhan nyata masyarakat. Apabila program tepat sasaran, maka tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal, sedangkan apabila salah sasaran, maka sumber daya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien dan efektivitasnya menurun.

Kesesuaian penerima manfaat dalam Program Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas program,

karena menunjukkan apakah pelaksanaan program benar-benar menyoar pihak yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi, pemerintah kelurahan, aparat wilayah, dan masyarakat, diketahui bahwa penentuan lokasi pemasangan dan perbaikan PJU telah dilakukan melalui kajian teknis, survei lapangan, serta usulan masyarakat. Pemasangan PJU umumnya difokuskan pada jalan utama, jalan penghubung, akses menuju fasilitas umum, serta area dengan aktivitas masyarakat tinggi dan tingkat risiko keselamatan yang lebih besar, sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Selain itu, mekanisme pengaduan melalui layanan SAPA PJU menunjukkan bahwa perbaikan PJU diarahkan pada lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan. Laporan masyarakat diverifikasi terlebih dahulu melalui survei lapangan, sehingga tindakan perbaikan dilakukan secara tepat sasaran. Di tingkat kelurahan dan RW, peran koordinatif dalam menampung dan meneruskan usulan warga turut mendukung kesesuaian penerima manfaat. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa PJU telah terpasang pada titik-titik strategis yang sering dilalui masyarakat, seperti persimpangan, jalan utama lingkungan, dan akses menuju fasilitas umum, sehingga mendukung keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat pada malam hari. Namun demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemerataan penerima manfaat belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat beberapa jalan lingkungan dan gang sempit yang membutuhkan tambahan penerangan, terutama di wilayah permukiman padat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan skala prioritas yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, secara umum sasaran penerima manfaat Program PJU di Kota Cimahi telah sesuai dengan tujuan program, yaitu melayani kebutuhan masyarakat pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2009) yang menyatakan bahwa efektivitas program dapat dinilai dari ketepatan dalam menentukan penerima manfaat, meskipun keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan.

C. Ketepatan Waktu

Dimensi ini menekankan pada pentingnya kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal atau waktu yang telah direncanakan. Ketepatan waktu berhubungan dengan prinsip efisiensi dan relevansi, sebab suatu program yang terlambat direalisasikan dapat kehilangan urgensi dan mengurangi manfaat yang seharusnya dirasakan. Secara akademis, ketepatan waktu menjadi tolok ukur efektivitas karena berkaitan erat dengan pencapaian target dalam kurun yang telah ditentukan serta kemampuan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Ketepatan jadwal pelaksanaan Program Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas program, karena berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi, diketahui bahwa pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan target penanganan laporan maksimal 2 x 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, ketepatan jadwal telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program PJU. Namun demikian, hasil wawancara dengan kelurahan, ketua RW, dan masyarakat menunjukkan bahwa ketepatan jadwal pelaksanaan belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Meskipun sebagian besar laporan kerusakan PJU ditindaklanjuti dalam waktu yang relatif cepat, pelaksanaan perbaikan sering kali mengalami penyesuaian waktu akibat faktor cuaca, kendala teknis, keterbatasan personel dan material, serta banyaknya laporan yang masuk secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan perbaikan PJU, khususnya di jalan lingkungan, memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan jalan utama. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan ketepatan jadwal antarwilayah. Pada ruas jalan utama dan lokasi dengan aktivitas masyarakat tinggi, PJU umumnya terpantau berfungsi dengan baik dan ditangani lebih cepat. Sebaliknya, pada beberapa jalan lingkungan dan gang sempit, masih ditemukan PJU yang mati dalam jangka waktu cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa ketepatan jadwal pelaksanaan Program PJU di Kota Cimahi telah berjalan

cukup baik, namun masih bersifat parsial dan memerlukan peningkatan agar pelaksanaan program dapat lebih merata dan konsisten di seluruh wilayah.

Kecepatan respon merupakan indikator yang menggambarkan seberapa cepat pelaksana menanggapi laporan atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program PJU. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi, diketahui bahwa mekanisme respon terhadap laporan PJU mati atau rusak telah disusun secara sistematis, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil temuan tim survei lapangan. Setiap laporan yang masuk umumnya ditindaklanjuti dengan respon awal berupa verifikasi dan survei lapangan sebelum dilakukan perbaikan, yang menunjukkan adanya kesiapan dan tanggung jawab pelaksana dalam menangani permasalahan PJU. Meskipun respon awal terhadap laporan tergolong cukup cepat, hasil wawancara dengan kelurahan, ketua RW, dan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan perbaikan di lapangan sering kali membutuhkan waktu beberapa hari hingga lebih dari satu minggu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelengkapan data laporan, ketersediaan material dan komponen, jumlah laporan yang masuk, serta tingkat urgensi lokasi PJU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan respon administratif sudah berjalan baik, namun kecepatan respon teknis masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Hasil observasi lapangan memperkuat temuan tersebut, di mana respon terhadap kerusakan PJU di jalan utama cenderung lebih cepat dibandingkan di jalan lingkungan. Pada beberapa titik jalan lingkungan, masih ditemukan PJU yang mati dalam waktu cukup lama meskipun telah dilaporkan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menilai bahwa kecepatan respon Program PJU di Kota Cimahi telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Diperlukan peningkatan manajemen prioritas, ketersediaan material, serta penyederhanaan mekanisme pelaporan agar respon terhadap kerusakan PJU dapat dilakukan lebih cepat, merata, dan konsisten di seluruh wilayah.

D. Pencapaian Tujuan

Efektivitas secara esensial selalu dikaitkan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Dimensi ini merupakan

ukuran outcome dari suatu program, baik dalam bentuk hasil kuantitatif (misalnya angka capaian tertentu) maupun kualitatif (misalnya peningkatan kesadaran masyarakat). Dalam perspektif akademis, pencapaian tujuan menjadi indikator utama efektivitas karena merefleksikan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi.

Kesesuaian hasil dengan tujuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas Program Penerangan Jalan Umum (PJU), karena menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan program, PJU diarahkan untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan, rasa aman, serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas pada malam hari. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan secara terencana melalui target pemasangan dan pemeliharaan yang jelas, didukung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dari sisi pelaksana program, capaian realisasi fisik pemasangan dan perbaikan PJU yang mencapai 100% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa output program telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis, terutama keterbatasan anggaran pemeliharaan dan ketersediaan material, yang berdampak pada lambatnya penanganan beberapa lampu PJU yang rusak atau mati. Kendala tersebut bersifat operasional dan tidak secara langsung menghambat pencapaian tujuan utama program. Pandangan pemerintah kelurahan, aparaturnya, dan masyarakat memperkuat temuan tersebut. Secara umum, penerangan jalan dinilai mengalami peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya, baik di jalan utama maupun di lingkungan permukiman. Peningkatan pencahayaan ini dirasakan mampu mengurangi titik-titik gelap serta meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat. Walaupun masih terdapat keluhan teknis di beberapa titik, hasil program secara keseluruhan dinilai telah sejalan dengan tujuan Program PJU. Dengan demikian, kesesuaian hasil dengan tujuan Program PJU di Kota Cimahi dapat dikategorikan cukup baik.

Kepuasan program merupakan indikator yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pelaksanaan Program PJU. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa program mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima manfaat. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PJU mencapai 86,66%, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas terhadap pelayanan penerangan jalan umum. Hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan, ketua RW, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan PJU memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang lebih terang membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas pada malam hari, serta membantu meningkatkan visibilitas pengguna jalan. Mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kondisi penerangan jalan saat ini, meskipun masih terdapat beberapa keluhan terkait lampu mati, redup, atau penerangan yang belum merata di gang-gang kecil. Hasil observasi lapangan juga mendukung pernyataan tersebut, di mana sebagian besar ruas jalan telah memiliki penerangan yang cukup memadai. Namun, peneliti masih menemukan beberapa titik PJU yang belum berfungsi optimal, yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program PJU di Kota Cimahi tergolong baik, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, peningkatan pada aspek pemeliharaan dan kecepatan penanganan gangguan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ke depannya.

E. Perubahan Nyata

Efektivitas juga dinilai dari adanya perubahan nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Perubahan tersebut dapat berupa perbaikan kondisi sosial, peningkatan kesejahteraan, perubahan perilaku, maupun dampak positif lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara akademik, dimensi ini menekankan bahwa efektivitas tidak hanya diukur

dari output administratif, tetapi juga outcome yang berimplikasi pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Dampak program merupakan indikator yang menilai perubahan nyata yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Program Penerangan Jalan Umum (PJU). Dalam konteks efektivitas program, dampak menunjukkan sejauh mana program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, Program PJU di Kota Cimahi telah membawa perubahan signifikan terhadap kondisi penerangan jalan, khususnya pada malam hari. Jalan yang sebelumnya minim penerangan kini menjadi lebih terang, sehingga meningkatkan visibilitas pengguna jalan dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih aman dan tertib. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PJU tidak hanya berdampak pada aspek teknis penerangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan. Penggunaan lampu LED hemat energi, penerapan sistem meterisasi, serta perbaikan sarana dan prasarana PJU memberikan dampak positif dalam jangka panjang, baik dari sisi penghematan anggaran maupun keberlanjutan program. Selain itu, peningkatan kualitas pemeliharaan PJU turut memperkuat dampak program dalam menjaga kondisi penerangan jalan agar tetap berfungsi dengan baik. Dari perspektif pemerintah kelurahan, aparatur wilayah, dan masyarakat, dampak Program PJU dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang lebih terang meningkatkan rasa aman, mengurangi potensi gangguan keamanan, serta mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hari. Meskipun masih ditemukan beberapa titik PJU yang belum berfungsi optimal, kondisi tersebut bersifat terbatas dan tidak mengurangi dampak positif program secara keseluruhan. Dengan demikian, Program PJU di Kota Cimahi dapat dinilai telah memberikan dampak yang nyata dan positif, baik dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, keamanan lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan yang bersumber dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Cimahi, pemerintah kelurahan,

aparatur wilayah, serta masyarakat sebagai penerima manfaat, yang diperkuat dengan hasil observasi lapangan dan analisis peneliti, diketahui bahwa efektivitas Program Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut bersifat struktural, teknis, dan administratif, serta tidak menunjukkan kegagalan program, melainkan menjadi indikator bahwa pelaksanaan Program PJU masih memerlukan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih optimal dan merata. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya pemasangan PJU baru, pemeliharaan rutin, serta perbaikan lampu yang mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan belum seluruh jalan lingkungan dan gang sempit memperoleh penerangan yang memadai, sehingga pemerataan manfaat program belum sepenuhnya tercapai.

Selain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan material juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program PJU. Jumlah petugas teknis yang terbatas harus menangani banyak titik PJU yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cimahi, sehingga penanganan laporan kerusakan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Di sisi lain, keterbatasan stok material dan proses pengadaan yang bersifat administratif menyebabkan perbaikan PJU tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Mekanisme pelaporan yang masih berjenjang serta keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap saluran pengaduan langsung turut memperlambat respon awal terhadap kerusakan PJU. Selain itu, kondisi teknis lapangan, seperti akses yang sempit, wilayah permukiman padat, serta faktor cuaca, juga menjadi kendala yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan perbaikan PJU.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas Program PJU. Upaya tersebut antara lain melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penanganan laporan dan pelaksanaan perbaikan PJU, pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat melalui layanan SAPA PJU, serta

penetapan skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak keselamatan. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT, dan RW dilakukan untuk memperoleh data kebutuhan PJU yang lebih akurat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Dinas Perhubungan juga melaksanakan survei dan pemantauan lapangan secara berkala untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini. Berdasarkan analisis peneliti, berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PJU. Meskipun keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan telah memberikan kontribusi positif dan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta pemerataan manfaat Program PJU di Kota Cimahi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung oleh wawancara, observasi lapangan, serta analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa Program Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi secara umum telah berjalan cukup efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari pemahaman pelaksana yang baik terhadap tujuan, sasaran, dan mekanisme program, ketepatan sasaran pemasangan PJU pada jalan-jalan utama dan lokasi dengan aktivitas masyarakat tinggi, serta adanya dampak positif berupa meningkatnya rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat pada malam hari. Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui keterbatasan dalam ketepatan waktu penanganan kerusakan, pemerataan penerangan di jalan lingkungan dan gang permukiman, serta kesinambungan pemeliharaan PJU. Oleh karena itu, meskipun Program PJU telah memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, diperlukan penguatan dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan responsivitas pelayanan dan pemerataan distribusi penerangan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiana, R. (2024, Agustus 7). *Dishub Kota Cimahi Bakal Pasang Ratusan Penerangan Baru Tahun Ini*. Retrieved from Cimahikota.go.id: <https://cimahikota.go.id/berita/detail/82647-dishub-kota-cimahi-bakal-pasang-ratusan-penerangan-baru-tahun-ini>
- Hardiana, R. (2025, Juni 16). *Pemkot Cimahi Pasang Puluhan PJU Dekoratif Tahun Ini*. Retrieved from Cimahikota.go.id: <https://cimahikota.go.id/berita/detail/83136-pemkot-cimahi-pasang-puluhan-pju-dekoratif-tahun-ini>
- LimaWaktu. (2025, April 14). *Warga Cibabat komplain Dua Minggu Lampu PJU Mati*. Retrieved from Limawaktu.id: <https://limawaktu.id/news/warga-cibabat-komplain-dua-minggu-lampu-pju-mati>
- Rahmawati, D. (2024). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Bandung 2023*. 4.
- Sundari, L. S. (2024, November 2024). *3.959 Titik Penerangan Jalan Diperbaiki Dishub Cimahi Selama Tahun 2024, Ini Penyebab Rusaknya PJU*. Retrieved from KoranGala: <https://www.koran-gala.id/news/amp/58713884708/3959-titik-penerangan-jalan-diperbaiki-dishub-cimahi-selama-tahun-2024-ini-penyebabrusaknya-pju>